BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. UNIVERSITAS ISLAM MENUJU *CENTER OF EXCELLENCES*

1. PTAI dan Isu-Isu yang Berkembang

Secara filosofis, Islam merupakan *way of life* (falsafah kehidupan) yang bersifat holistik dan universal. Dari sudut pandang epistemologis (falsafah keilmuan), Islam tidak mengenal dualisme ilmu yang bersifat dikhotomik. Sekali lagi, Islam tidak pernah memisahkan secara taksonomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi studi pendidikan Islam saat ini terjebak kedalam paradigma pola pikir bahwa keilmuan agama dan umum telah terpisah. Ada beberapa penyebab mengapa pola pikir tersebut bisa terjadi, diantaranya : *Pertama,* karena mereka yang terjebak kedalam ilmu-ilmu sekuler. *Kedua*, mereka yang terjebak kedalam paradigma ulama-ulama fiqih klasik. *Ketiga*, mereka yang mencoba mengawinkan antara model berpikir sekuler dengan model berpikir ulama klasik. Dan *keempat*, mereka yang mencoba keluar dari ketiga jenis model paradigm itu dan mencoba membangun paradigm baru yang disebut "paradigma Islam".[1]

Ilmu Pendidikan Islam yang dikembangkan dengan model pradigma kedua memandang bahwa ilmu pendidikan Islam sesungguhnya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith, oleh karenanya fenomina pendidikan Islam harus dilihat dari kacamata Al-Qur'an dan Al-

[1] Munir M., *Pendidikan Islam Dalam Persefektif Paradigm Islam; Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jurnal *Arah Baru Studi Islam Di Indone*sia, (Yogyakarta; Arruszmedia, 2008), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith yang biasanya menggunakan metode deduktif analogis[2] sebagai model berpikir yang bertumpu pada logika *stoia*. Ilmu pendidikan Islam yang dikembangkan dengan model berpikir yang ketiga memandang bahwa islam melalui Al-Qur'an Dan Al-Hadith telah memuat konsep tentang pendidikan, namun pada waktu yang sama ada paham atau filsafat bangsa lain berhasil mengembangkan pendidikan yang lebih baik dari pendidikan Islam yang ada sekarang, sehingga perlu usaha adopsi atau adaptasi ilmu pendidikan non-Islam tadi kedalam sistem pendidikan Islam.

Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan, dikalangan masyarakat Islam berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu-ilmu agama Islam-lah yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya. Sementara ilmu-ilmu sekuler dipandang sebagai sesuatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak dan patut dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis ini, kemudian berimplikasi juga terhadap cara pandang sebagian umat Islam terhadap pendidikan. Sebagian umat Islam hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita menjadi Muslim yang sejati demi mencapai kebahagiaan di akhirat.

Sebaliknya, sebagian orang yang lebih cenderung memilih lembaga-lembaga pendidikan umum dengan pertimbangan jaminan mutu serta jaminan pekerjaan yang bakal dipoeroleh setelah lulus. Bagi mereka

[2] Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an,* terj. Hm. Arifin dan Zainuddin, (Jakarta; Renika Cipta, 1990), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, lembaga pendidikan yang berlabel Islam cenderung dipandang sebagai tradisional, ketinggalan zaman, dan oleh karena itu mutu dan kesempatan kerja setelah lulus lebih diutamakan. Akhirnya, IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang masih berorientasi pada fokus kajian Islam dianggap tidak mampu lagi menyiapkan anak didik untuk bersaing dengan kebutuhan jaman program studi (prodi) Islam IAIN sulit diminati masyarakat. karena berbagai fakultas dan program studi yang dikembangkan selama ini, secara institusional di nilai belum mampu mengakomodir pengembangan dua jenis ilmu yang seharusnya bersifat menyatu (*unity of knowledges*) dengan prinsif *tafaqquh fiddin* (mendalami secara lebih intens ilmu-ilmu keagamaan).

2. PTAI Menanggapi Isu

Dewasa ini lembaga pendidikan Islam Negeri memasuki fase baru, yaitu suatu keadaan dimana ruang lingkup program akademik yang dilaksanakan selama ini dalam bentuk institut sudah perlu dikembangkan kepada ruang lingkup program akademik yang lebih luas dalam bentuk universitas.

Tulisan ini akan mencoba mengemukakan tentang apa urgensi yang melatar belakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN itu; Apa saja masalah yang harus dipecahkan agar rencana konversi IAIN menjadi UIN itu dapat diwujudkan; Serta bagaimana langkah selanjutnya. Paling tidak terdapat lima alasan yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN sebagai berikut :[3]

[3] *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Cet III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, adanya perubahan jenis pendidikan pada Madrasah Aliyah. Jika pada masa lalu Madrasah Aliyah merupakan sekolah agama, maka sekarang Madrasah Aliyah sudah menjadi sekolah umum yang bernuansa agama. Dengan kata lain muatan mata pelajaran umum pada Madrasah Aliyah sekarang lebih dominan dan lebih kuat dibandingkan Madrasah Aliyah pada masa sebelumnya. Pada masa sekarang di Madrasah Aliyah sudah terdapat jurusan Sosial, Eksakta, Bahasa, dan Fisika. Lulusan Madrasah Aliyah ini akan sulit masuk IAIN, jika IAIN yang ada sekarang hanya menyediakan jurusan dan program studi agama saja. Agar lulusan Madrasah Aliyah dapat diterima di IAIN, maka IAIN harus dirubah menjadi Universitas.Jika tidak segera dilakukan perubahan, maka IAIN tidak dapat dimasuki oleh para lulusan Madrasah Aliyah tersebut.

Dengan demikian, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan yang tepat bagi lulusan Madrasah Aliyah. Selanjutnya tidak itu saja. Perubahan IAIN menjadi UIN juga akan membuka kesempatan bagi tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) untuk belajar di IAIN. Hal ini penting dikemukakan, karena IAIN selama ini secara umum hanya menampung tamatan Madrasah Aliyah dan belum banyak memberikan peluang bagi tamatan SMU. Dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka tamatan Aliyah, Pondok, Pesantren, SMU dan sejenisnya akan dapat diterima di UIN dengan syarat yang bersangkutan lulus dalam seleksi ujian masuk.i Dengan demikian perubahan IAIN menjadi UIN ini karen mengemban misi pemberdayaan umat untuk masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan. Hal itu sejalan dengan pikiran Alvin Toffler yang mengatakan bahwa semua proses pendidikan adalah sesuatu kegiatan yang lahir dari uatu pandangan ke masa depan, bahkan membentuk gambaran masa depan atau dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, bahwa generasi muda hendaknya dididik sesuai dengan prinsip bahwa mereka akan hidup pada zamannya sendiri, bukan zaman kita.[4]

Kedua, adanya dikhotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikhotomi tersebut antara lain dapat diatasi dengan program integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum[5] dengan cara merubah IAIN menjadi UIN. IAIN yang sekarang ini hanya menyelenggarakan program studi agama saja dinilai hanya akan melestarikan dikhotomi tersebut. Dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN maka dikhotomi akan dapat dihilangkan. Dalam kaitan ini, maka mahasiswa yang kuliah pada fakultas-fakultas keagamaan, seperti Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin dan sebagainya, selain mendalami bidang keagamaan sebagai kelompok major, juga diberikan wawasan bidang ilmu-ilmu umum. Pada saat ini para sarjana ilmu-ilmu agama asyik dengan dirinya sendiri mengkaji ajaran agama tanpa bantuan ilmu pengetahuan umum, sehingga hasil kajian tersebut kurang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan syarakat yang semakin maju. Para lulusan atau sarjana ilmu-au agama menjadi sempit ruanggeraknya, dan terbatas sekali ; yang dapat diakses. Mereka itu semakin terpinggirkan dan tidak dapat bersaing dengan sarjana dari

[4] Abuddin Nata, *Managemen Pendidikan*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 64
[5] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perguruan Tinggi lain. Sementara para sarjana umum juga asyik dengan ilmunya, tanpa melihat hubungannya dengan agama. Ilmu-ilmu yang mereka miliki adalah ilmu-ilmu sekuler, bebas nilai dan bebas moral. Akibatnya ilmu-ilmu tersebut sangat mudah digunakan untuk tujuan - tujuan yang merugikan. Melalui perubahan IAIN menjadi UIN maka dapat dilakukan apa yang disebut sebagai Islamisasi, spiritualisasi atau integrasi antara ilmu pengetahuan. Yaitu upaya saling mendekatkan diri antara satu dan lainnya. Sarjana Umum Agama diberi wawasan ilmu pengetahuan umum, dan sarjana Ilmu pengetahuan umum diberi wawasan ilmu agama. Dengan demikian terciptalah intelek yang ulama, dan ulama yang intelek.

Ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang yang lebih luas kepada para lulusannya untuk dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas.[6] Selama ini para lulusan sarjana IAIN sebagian besar hanya bekerja di Departemen Agama RI, atau Departemen atau instansi lainnya, namun bidang pekerjaannya tetap. Di antara lulusan IAIN memang ada yang menjadi pejabat tinggi seperti menjadi menteri, anggota legislatif, dan jabatan lainnya. Namun secara keseluruhan bidang pekerjaan mereka tetap saja bidang agama. Masih jarang atau mungkin belum ada sarjana IAIN yang menjadi direktur sebuah bank, direktur pertamina, direktur industri, dan jabatan-jabatan strategis non-keagamaan lainnya. Jabatan-jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan tinggi non IAIN, seperti LIBI, UGM, UI, dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan tersebut nantinya dapat pula diisi oleh para

[6] Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), cet. II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarjana IAIN, jika IAIN sudah berubah menjadi UIN. Dalam hubungan ini asumsi kita mengatakan bahwa jika jabatan-jabatan non-keagamaan tersebut dapat diisi oleh tamatan UIN, maka diharapkan akan memiliki nilai plus. Yaitu karena para sarjana tamatan UIN ini selain menguasai bidang keahlian dan keilmuan yang dibutuhkan lapangan kerja, juga memiliki dasar agama yang kuat, yang pada gilirannya dapatmemperkuat akhlak dan moral pekerjaan.

Keempat, perubahan IAIN menjadi UIN diperlukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Para lulusan UIN nantinya tidak akan termarjinalisasikan (terpinggirkan) lagi, melainkan akan dapat memasuki wilayah gerak yang lebih bervariasi dan bergengsi. Posisi mereka nantinya tidak hanya berada di wilayah pinggiran, *suplement* dan asal kurang diperhitungkan, melainkan berada dalam wilayah strategis dan diperhitungkan orang. Mereka tidak hanya menjadi tukang membaca do'a, imam shalat, dan sebagainya, melainkan juga dapat mengambil peran sebagai penentu dalam perjalanan sejarah bangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Para lulusan IAIN dapat mempelopori upaya mendirikan tuan di rumahnya sendiri. Hal ini perlu dilakukan, karena hingga saat ini peluang-peluang strategis tersebut kini berada di tangan orang lain. Melalui perubahan IAIN menjadi UIN ini kita menginginkan lahirnya ummat Islam sebagai adidaya dan pelopor dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan peradaban umat manusia sebagaimana yang demikian itu pernah dilakukan oleh ummat Islam di abad klasik.

Kelima, perubahan IAIN menjadi UIN juga sejalan dengan tuntutan ummat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi juga lebih menawarkan banyaknya pilihan.Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya tuntutan dari era globalisasi yang menghendaki lahirnya manusia-manusia yang unggul dan mampu merebut peluang dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan dan kompetitif. Selain itu karena telah terjadi perubahan pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan umat yang makin baik, menyebabkan mereka memiliki kemampuan ekonomi untuk mendidik putera-puterinya pada jurusan dan program pendidikan yang secara ekonomi menghendaki biaya yang lebih tinggi. Demikian pula adanya perubahan orientasi hidup dari yang semula semata-mata bersifat ukhrawi, menjadi orientasi hidup yang menghendaki keseimbangan dengan kehidupan duniawi. Hal ini menyebabkan ummat Islam tidak hanya menghendaki anaknya kuliah pada bidang studi agama, melainkan juga pada bidang non-keagamaan.

Itulah di antara sebab-sebab mengapa IAIN perlu merubah , dirinya dari bentuknya yang ada sekarang menjadi universitas.; Perubahan ini tampak mendesak dan sudah waktunya untuk dilakukan. Istilah *al jami'ah* dengan makna universitas dan sekaligus terkait dengan konotasi Islam sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya sudah cukup menguntungkan dilihat dari segi misi perubahan IAIN menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas, yaitu lembaga yang disamping menyelenggarakan program studi umum, juga bernuansa Islam. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut bahasa Arab sebenarnya istilah IAIN yang didalamnya terdapat kata *al-Jami'ah* sudah menggambarkan universitas. Namun istilah IAIN menjadi berbeda artinya ketika kata al-Jami'ah tersebut diartikan institut. Disinilah letak kesalahan dan kurang taktisnya para pendahulu kita yang menerjemahkan *al-Jami'ah* menjadi institut, dan bukan dengan terjemahan universitas.[7]

Berubahnya IAIN mejadi UIN yang dicita-citakan sebagai *center of exellence* bagi pengembangan keilmuan pada umumnya dan keilmuan Islam pada khususnya, sehingga terbentuk komunitas ilmiah-religius *(religious-scientific community*) yang bersendikan ajaran agama, bukan sekadar pengawal, penjaga, dan pelestari tradisi. Hal ini mengasumsikan bahwa UIN bukan hanya piawai sebagai pencetak guru agama dan kiai tradisional saja, melainkan bagaimana bisa melahirkan kiai-kiai profesional di dalam mengurus pesantren perikanan, pesantren peternakan, pesantren perkebunan, pesantren pertambangan, pesantren perindustrian, dan sebagainya.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM

1. Memahami Konsep Kebijakan Pendidikan (*Education Policy*)

Sebelum lebih jauh membahas kebijakan pendidikan, terlebih dahulu penulis menjelaskan kebijakan public. Secara etimologi kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dalam bahasa inggris. Dalam

[7] Abuddin Nata, *Managemen Pendidikan*….. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa latin *politia* yang berarti Negara, *polis* disebut dalam bahasa bahasa yunani yang berarti kota dan kata *pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota serta *police* dalam bahasa inggris berarti adminisrasi pemerintah. Berdasarkan asal kata ini menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal dengan politic, policy, polici. Politic berarti seni dan ilmu pemerintah (*the art and science of government)*, sedangkan *policy* berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan *police* berarti hal-hal yang berkernaan dengan pemerintahan adapun kebijakan pendidikan terjemahan dari *educational policy*.[8] Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan *polity trem* digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan. Istilah kebijakan atau *polity* digunakan untuk menunjuk prilaku seorang aktor yaitu seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan.[9] Maka sebuah kebijakan merupakan putusan seorang pemimpin atau yang mempunyai wewenang dalam sebuah lembaga.

Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkunganya. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk

---

[8] Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya) 42-45

[9] Ali Muhdi, Karaker Kebijakan Pendidikan Nasional & Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (Studi Komparasi Era Orde Baru dan Reformasi), (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007) 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan para menajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.[10]

Jika mengkaji kebijakan publik para ahli dalam mengungkapkan konsep kebijakan muncul berbagai variasi namun pada dasarnya mempunyai pandang yang sama seperti menurut Anderson yang dikutib oleh Budi Winarno bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Amir Santoso dalam sudut pandangnya bahwa kebijakan publik terdiri dari dua ranah yaitu ranah pertama dengan menyamakan kebijakan publik dengan tindakan – tindakan pemerintah dan pada ranah kedua bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.[11]

Maka dapat di katakan bahwasannya kebijakan publik di pandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, dari sini dapat kita lihat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan atau aktor yang legitimasi dalam mengeluarkan serangkaian intruksi kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk tercapainya tujuan. Sebuah kebijakan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan adanya perencanaan dari sebuah fenomena–fenomena dan masalah yang muncul secara publik yang menjadi petunjuk arah bagi

---

[10] Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Public* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989),16

[11] Syafaruddin, *Evektivitas Kebijakan Pendidikan: konsep, strategi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana kebijakan agar tujuan dari solusi permasalahan dapat terimplementasikan sehingga tercapainya tujuan yang di inginkan.

Tidak jauh berbeda dalam hal ini Hough juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.[12] Beberapa pandangan diatas menunjukkan bahwa kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendakai pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. [13]

Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementasi yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.[14] Adapun konsep kebijakan dalam penelitian ini dibatasi pada kebijakan implementatif, yaitu keputusan-keputusan berupa upaya-upaya atau program yang dilakukan stake holder UINSA dalam upaya pencapaian visi dan misi setelah mengkonversikan diri menjadi UINSA.

Berbicara pendidikan tentunya yang terbayangkan secara global seluruh kegiatan pembelajaran baik dengan guru maupun dengan lingkungan dan pengalaman, baik bersifat formal, non formal maupun

---

[12] http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/111-pengantar-analisis-kebijakan-pendidikan.html

[13] Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan , Konsep, Teori, dan Model,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 2011), 34

[14] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kebijakan dan Evaluation Resarch: Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004). 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informal jika menyelam khusus maka tergambar dalam pendidikan ialah sebuah proses pembelajaran yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga, guru, siswa materi tempat bertemunya guru dan siswa dll.

Pendidikan adalah aktivitas atau upaya yang sadar dan terencana, dirancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual, maupun mental dan social.[15] Pendidikan merupakan : a) usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi jasmani dan rohani yang sifatnya indrawi dan keterampilan tertentu, dan rohaninya yang berkaitan dengan olah pikir, olah rasa, karsa, cipta, dan perilaku etika atau budi/susila. b) Institusi yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita dan tujuan pendidikan, system dan organisasi pendidikan, baik pendidikan dalam lembaga keluarga, masyarakat, sekolah dan Negara. c) Berkaitan dengan hasil yang dicapai dalam pendidikan dan mampu meningkatkan kebudayaan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana masyarakat lebih dewasa berfikir, lebih teknologis dalam menjalani kehidupan, dan rasional, efektif, efesien dalam melakukan berbagai jenis obyek kerja.[16]

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan, kebijakan publik berkenaan dengan segala kebijakan yang di ambil oleh pemerintah seperti kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, kebijakan hukum, kebijakan agama dan lainnya yang menyangkut dengan

---

[15] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung, Rosdakarya, 2001), 37

[16] Tim Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, *Kapita Selekta-Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, (Malang: 1981), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problem warga negara, Maka berbicara kebijakan pendidikan sama halnya dengan kebijakan publik namun mengkhususkan pada bidang pendidikan yang merupakan gabungan kata *policy education*. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya berupa keputusan yang subtansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan.[17]

Dalam kebijakan pendidikan menurut Divine, memiliki empat dimensi pokok yaitu :

a. Dimensi Normatif, terdiri dari atas nilai, standart dan filsafat, dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada.
b. Dimensi Struktural, dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur, yang menegaskan dan mendukung suatu kebijakan pendidikan.
c. Dimensi Konstituenstif, terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan,

[17] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dimensi tekhnis, menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi, dan penilaian dari pembuatan kebijakan pendidikan.[18]

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan pendidikan ialah seperangkat ketetapan, peraturan yang di usung pemerintah -- dalam penelitian ini adalah stakeholders UINSA-- berdasarkan permasalahan yang timbul di bidang pendidikan yang dimulai dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi terhadap sistem pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh adalah kebijakan dalam mengkonversi IAIN menjadi UINSA serta kebijakan-kebijakan rekonstruksi keilmuan dalam pengembangan program studi yang menjadi barometer ketercapaian tujuan setelah mentransformasikan diri menjadi UINSA.

2. Merumuskan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik.[19]

Kebijakan yang di hasilkan oleh sebuah pemerintahan tentunya melalui proses ilmiah untuk menghasilkan sebuah kebijakan, begitu juga

[18] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan,* (Jogjakarta : AR-Ruzz Media, 2011), 19
[19] Syafaruddin, *Evektivitas Kebijakan*., hlm.125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebijakan pendidikan yang meracik seputar kebutuhan dalam pendidikan agar dapat terlaksana, untuk merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan sistematis seperti berikut ini:

a. Munculnya Masalah dan Isue

Kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik. Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara untuk memecahkannya.[20] Masalah biasanya muncul ketika ada *deskripansi* (kesenjangan) antara dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*descripancy*) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata tersebut.[21]

Oleh karena itu munculnya suatu masalah misalnya apakah pemerintah harus membuat peraturan tentang standar pendidikan dengan tingkat kelulusan pada dasarnya pada konflik asumsi mengenai tingkat kualitas pendidikan. Selanjutnya isu menjadi embrio bagi awal munculnya masalah publik di bidang pendidikan jika masalah ini mendapat perhatian khalayak ramai maka akan masuk perhatian yang menyebabkan isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan khususnya agenda kebijakan pendidikan.[22]

---

[20] tpsofian.staff.ugm.ac.idkuliahModel Kebijakan.pdf

[21] Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan, Analisis, Dinamika, Formulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), 87

[22] Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, (Yogyakarta : MedPress, 2008), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cenderung isu yang muncul dan berbuntut masalah di dunia pendidikan tentunya dalam ranah pendidikan baik berupa siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, lembaga pendidikan, mulai dari tingkat kabupaten atau kotamadya hingga tingkat elit yaitu di kementerian pendidikan semua ini merupakan sorotan publik terhadap perkembangan pendidikan baik di tinjau secara umum maupun secara khusus. Masalah yang dihadapi oleh masing-masing bangsa sangat beragam dengan bobot kesulitan yang beragam pula. Menurut Suryati sebagaimana yang dikutip oleh Arif Rohman, Indonesia memiliki lima pokok masalah dalam pendidikan yaitu : *pertama*, masalah pemerataan pendidikan. *Kedua*, masalah daya tampung pendidikan. *Ketiga*, masalah relevansi pendidikan. Keempat, masalah kualitas pendidikan. *Kelima*, masalah *efisiensi* dan *efektifitas* pendidikan.[23]

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik di bidang politik, yang terdiri dari 2 lapisan kelompok sosial: 1) lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur; 2) lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur, Peraturan pemerintah mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yang berkuasa. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin

[23] Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan, Analisis*…… 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan *status quo*, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat *inkremental* -- berkembang sedikit demi sedikit secara teratur -- maupun *trial* and *error* yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Maka disaat ini isu yang berkembang menjadi perhatian publik di bidang pendidikan dengan berkembangnya isu informasi didapat dengan mudah sehingga dapat mengetahui kesalahan dalam sebuah kebijakan dan agar dapat memperbaikinya.

b. Pengagendaan

Untuk dapat menjadi agenda kebijakan, baik sistemik maupun pemerintah, suatu masalah harus melalui proses atau tahapan tertentu. Ripley mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh H. M. Hasbullah bahwa proses suatu isu diangkat menjadi agenda kebijakan dan selanjutnya menjadi kebijakanyang diambil pemerintah, yaitu : a) terdapat masalah sosial, b) diterima kelompok, c) kemudian bergabung dengan kelompok yang berbeda, d) menjadi isu sosial, e) sampai pada agenda publik, f) tindakan pengartikulasian, g) keputusan kebijakan mengenai beberapa maslah telah dibuat, h) kelompok mulai menekankan strategi isu terkait. [24]

Pada tahap ini seluruh isu dan masalah yang berkembang yang mempunyai urgensi terhadap kemaslahatan masyarakat, maka secara otomatis isu dan masalah tersebut mendapat perhatian publik dan pejabat yang berwenang. Para aktor yang memfilter masalah dan isu

[24] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan, Alam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang muncul dan layak untuk di lakukan untuk di identifikasi lebih awal di bandingkan dengan isu dan masalah lain yang sedang hangat, untuk dimasukkan kepada pengagendaan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konfliknya terjadi di antara elit politik itu sendiri.

Munculnya berbagai masalah yang sangat urgen di kalangan masyarakat menjadi sorotan publik baik melalui media massa maupun media cetak para pejabat yang menangani masalah yang berkaitan dengan jabatannya menjadi pengagenda dan memfilter masalah yang ada, pada tahap ini suatu masalah bisa tidak disentuh dan yang lain menjadi fokus dengan melihat kualitas masalah yang ada.

Kebijakan pendidikan dirumuskan secara hati-hati lebih-lebih menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro, maka hampir dapat dipastikan perumusan kebijakan pendidikan tersebut dilandasi oleh suatu paham teori tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan pengambilan kebijakan terlebih dahulu telah mempertimbangkan secara matang, baik secara rasionalitas, proses, nilai serta efek samping yang bakal terjadi.[25]

c. Formulasi Kebijakan

Setelah masalah teridentifikasi maka berlanjut kepada proses yang sangat urgen yaitu membuat formulasi kebijakan. Anderson mengungkapkan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-

[25] Ibid…. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.[26] ini merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan tahapan agenda *seting* yang lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagi tekhnis analisis untuk membuat keputusan terbaik.[27]

Pada tahap formulasi, masalah-masalah yang sudah masuk ke dalam agenda para perumus kebijakan mencari pemecahan masalah terbaik, semua yang mempunyai kepentingan disini bersaing untuk memberikan kontribusi agar dapat dikonsumsi oleh perumus kebijakan kemudian para kebijakan. Mengadopsi masukan yang ada dari sekian banyak alernatif yang di tawarkan oleh perumus hingga mengambil keputusan kebijakan yang akan di tetapkan oleh lembaga legislatif, atau peradilan. Jika sebuah kebijakan telah diambil maka secara tidak langsung pemerintah mewajibkan untuk mengimplementasikan kepada unit-unit administtrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia pada tahap terakhir evaluasi dengan bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah di rumuskan dapat memcahkan permasalahan.[28]

Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis teori perumusan kebijakan,[29] yaitu: 1) Teori kelembagaan, 2) Teori proses, 3) Teori kelompok, 4) Teori Elit, 5)

---

[26] Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan* ……., 95
[27] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 80
[28] Budi Winarno, *Kebijakan Publik*….. 18- 19
[29] H.A.R.Tilaar & Riant Nugroho, *KebijakanPendidikan,* (Yogyakarta: PusakaPelajar, 2008), 190-191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori Rasional, 6) Teori Inkremental, 7) Teori Permainan, 8) Teori Pilihan Publik, 9) Teori system, 10) Teori pengamatan, 11) Teori Demokratid, 12) Teori Strategis, 13) Teori Deliberasi.

Kebijakan publik untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori. *Pertama*, ada kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensil dari sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersier. Sebagian dari kebijakan ini berhubungan dengan kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran, rekrutmen dan pendaftaran siswa, penilaian siswa, penghargaan dalam bentuk ijasah, diploma, dan disiplin siswa. *Kedua*, ada kebijakan yang berkenaan dengan penetapan, struktur, dan pengaturan lembaga individual dan sistem pendidikan yang menyeluruh atau sebagian. *Ketiga* berhubungan dengan rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi dan remunerasi seluruh staf, tetapi terutama kategori-kategori berbeda dari para professional. Kategori *keempat* ialah kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan.[30]

d. Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Sebagaimana pengertian kebijakan publik dalam pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah,[31] seperangkat peraturan tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya yang membuat, begitu pula

[30] http://www.scribd.com/doc/18531284/Kebijakan-Pendidikan
[31] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*…… 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebijakan pendidikan. Simeon, menggolongkan lingkungan kebijaksanaan pendidikan menjadi; lingkungan politik dan lingkungan non politik, kedua lingkungan ini menurutnya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan, termasuk kebijaksanaan pendidikan. Kedua aktor-aktor, dalam hal menentukan siapa aktor kebijakan David Easton menerangkan bahwa ciri kebijakan publik yaitu kebijakan yang diformulasikan oleh penguasa dalam sistem politik. Yang dimaksud penguasa di sini adalah orang yang terlibat setiap hari dalam sistem politik sekaligus bertanggung jawab dalam persoalan ini, serta diakui keberadaannya oleh sebagian besar anggota sistem politik di mana tindakan-tindakannya dapat diterima serta mengikat dalam waktu yang panjang selama tindakan penguasa dalam batas kewenangannya.[32]

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus.[33] Adapun karakteristik yang dimaksud adalah :

1) Memiliki tujuan pendidikan, Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2) Memenuhi aspek legal-formal, Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan

[32] Budi Winarno, *Kebijakan Publik*.....37
[33] Media Indonesia, *Dalam Artikel*, *Kebijakan* , diakses tanggal 12 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3) Memiliki konsep operasional, Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
4) Dibuat oleh yang berwenang, Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5) Dapat dievaluasi, Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Memiliki sistematika, Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho ada beberapa aspek yang mencakup dalam kebijakan pendidikan :

a. Kebijakan pendidikan harus sesuai dengan visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
b. Kebijakan pendidikan harus meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
c. Kebijakan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
d. Kebijakan pendidikan harus ada keterbukaan dengan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
f. Analisis kebijakan karena kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik
g. Kebijakan pendidikan harus ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.
h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
j. Kebijakan harus berdasarkan efisiensi.
k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada peserta didik.
l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional.
m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebujakan pendidikan yang tepat, Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankankepentingan peserta didik.
n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat.

Aspek-aspek kebijakan pendidikan tersebut di atas, berfungsi sebagai acuan dalam proses membuat kebijakan pendidikan, agar kebijakan yang dibuat itu tersusun secara sistematis dan ilmiah serta terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya diperlukan tim pengawasan yang ketat. Dalam pembentukan tim pengawasan sebuah kebijakan, maka orang yang dipercayai tersebut, di harapkan dapat memberikan kontribusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggi, idealis dan cermat dalam persoalan yang muncul di lapangan, sehingga memanipulasi data dan informasi bisa terhindari.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan

Sebuah kebijakan yang diputuskan oleh para perumus tidak serta merta di putuskan tanpa adanya pertimbangan dari nilai- nilai yang mempengaruhinya, faktor yang dimaksud ialah segala hal yang berada diluar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Soepandi menyebutkan ada beberapa faktor lingkungan pendidikan yang meliputi; kondisi sumber daya alam, iklim, demografi, budaya politik, struktur sosial dan kondisi sosial ekonomi.[34]

Dalam pembicaraan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik di bidang pendidikan tentunya tidak terlepas dengan tuntutan percepatan IPTEK yang berkembang di manca negara untuk menghadapi persaingan global, dengan nilai yang telah di ungkapkan diatas maka para aktor yang merumuskan kebijakan menjadi filter yang mampu mencerna masalah yang timbul dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu kebijakan publik untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu;

a. Ada kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensil dari sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersier. Sebagian dari kebijakan ini berhubungan dengan kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran,

[34] Ali Muhdi, Karaker Kebijakan Pendidikan ……..39-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekrutmen dan pendapatan siswa, penilaian siswa, penghargaan dalam bentuk ijasah, diploma, dan disiplin siswa.

b. Ada kebijakan yang berkenaan dengan penetapan, struktur, dan pengaturan lembaga individual dan sistem pendidikan yang menyeluruh atau sebagian.

c. Berhubungan dengan rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi dan remunerasi seluruh staf, tetapi terutama kategori-kategori berbeda dari para professional.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan

Maka Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan pendidikan ialah faktor-faktor kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik umumnya dan khususnya segala sesuatu yang menyangkut dengan seluruh perangkat sistem pendidikan baik dengan kualitas guru, mutu pendidikan, anggaran pendidikan pengembangan kurikulum hingga pada peserta didik. Mengkaji banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan tentunya bukan hal mudah dalam merumuskan sebuah kebijakan harus cermat dan sangat teliti dalam menilai sebuah masalah. Maka tidak heran jika sebuah kebijakan muncul terkadang disaat masalah yang berkembang sudah kadarluarsa.

Dalam proses analisis kebijakan terdapat 4 elemen yang saling berkaitan yaitu faktor lingkungan, isi kebijakan, perumusan masalah serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan, serta akibat yang terjadi baik yang sesuai dengan lingkungan disekitarnya.[35]

4. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan dan menegangkan, pada tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan, suatu kebijakan dirumuskan untuk di implementasikan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan matang, pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara rumusan dengan aplikasi dilapangan yang apabila tidak sejalan, maka tujuan tidak bisa di capai sebagaimana telah di rumuskan.

a. Pengertian implementasi kebijakan

Sebagaimana yag tertuang dalam kamus *Webster*, implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak, akibat terhadap sesuatu). Sehigga pengertian diatas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, intruksi president, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan sebagainya.[36]

---

[35] Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Islam……..* 35

[36] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 64. Bisa lihat juga di Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan, Analisis, Dinamika, Formulasi Dan Implementasi,* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wibawa sebagaimana yang dikutip oleh H.M. Hasbullah, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang, namun dapat juga berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundang.[37]

Implementasi pada dasarnya adalah sebuah tahapan proses. Proses dalam pengertian ini adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan kebijakan yang telah dicanangkan. Kunci keberhasilan dalam upaya implementasi dari kebijakan adalah ditentukan oleh prosesnya, terwujud dalam tahapan-tahapan yang secara teknis berlangsung dalam kegiatan implementasi tersebut. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.[38]

---

[37] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 93

[38] Media Indonesia, Proses Implementasi Kebijakan Publik, http://hykurniawan.wordpress.com/2009/01/23/proses-implementasi-kebijakan-publik/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

b. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

1) Brian W. Hog Wood dan Lewis A.Gunn

Dua tokoh ini dengan konsepnya *the top-down aproach*, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperluka beberapa syarat diantaranya :

a) Kondisi ekternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada dan tersedia

d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal

e) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya

f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil

g) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

i) Adanya komunikasi koordinasi yang sempurna

j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna[39]

2) Teori Van Meter dan Varn Horn

Pertanyaan mengapa ada implementasi kebijakan yang berhasil dan implementasi kebijakan yang tidak berhasil menjadi awal gagasan dari kedua tokoh ini, sehingga kegelisahan tersebut dijawab sendiri mampu mengembangkan teori yang berangkat dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab setiap kaebijakan memiliki sifat dan karakter

[39] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 96-97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda. Menurut teori ini bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi kebijakan. Dengan memamfaatkan konse-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? Pertanyaan pertama tersebut menyangkut perubahan misalnya tentang sistem, perilaku dan tata kerja yang hendak diubah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja organisasi. Pertanyaan kedua menyangkut pengawasan dan pengontrolan struktur diatasnya terhadap struktur dibawahnya. Sedangkan pertanyaan ketiga menyangkut kepatuhan struktur dibawahnya terhadap struktur diatasnya.

Kemudian tokoh keduanya berusaha tipologi kebijakan, *pertama* jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. *Kedua*, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Dari kedua indikator ini, maka dapat ditangkap secara jelas bahwa suatu implementasi kebijakan akan diangap berhasil manakala pada suatu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kesepakatan terhadap tujuan dari pelaku/pelaksana dalam mengoperasikan program relatif tinggi.[40]

3) Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabiter

Teori yang dikembangkan dari tokoh ini disebut sebagai *a frame work for implementation analysis* atau kerangka analisi implementasi. Variabel-variabel yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan formal implementasi diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu :

a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan
b) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
c) Pengaruh lingkungan berbagai variabel politik terhadap kesimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.[41]

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implementasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan dapat berlaku dalam praktek. Walaupun pada awal ahun 2000 bangsa Indonesia banyak menghasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan namun masih banyak terjadi *overlaping* dan kesalahan dalam implementasi

[40] Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan, Analisis*…… 109
[41] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program-program pendidikan. Teori implementasi kebijakan di Indonesia 20% keberhasilan di lihat dari planing dan 60% dari Implementasi dan sisanya 20% adalah bagaimana mengendalikan implementasi.[42]

c. Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan

Secara teoritik, kebijakan pendidikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif meliputi;

1) Pendekatan Struktural (*Struktur Approach)*, ialah pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara *structural*. Namun titik lemah dari pendekatan *structural* ini adalah, proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.[43]
2) Pendekatan Prosedural Manajerial (*Procedural and managerial approach)*, merupakan pendekatan yang muncul dalam rangka memberikan koreksi atas pendekatan. Ada tiga langkah-langkah yang tepat dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: a) Membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu. b) Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan

[42] H.A.R.Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan*…… 211
[43] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat, c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.[44]

3) Pendekatan Prilaku *(Behavioural Approach)*, pendekatan prilaku meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada prilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya sebagaimana pendekatan struktural atau pada tekhnik menajemennya sebagaimana pendekatan prosedural diatas. Pendekatan prilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila prilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. Beberapa kejadian sering terlihat dimana program kebijakannya baik, peralatan dan organisasi pelaksananya juga baik, namun ditengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan di masyarakat.[45]

4) *Political Approach*, adalah pendekatan yang lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan.[46]

Para pengambil keputusan dapat memilih pendekatan mana yang akan diambil, dengan melihat dari masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian dapat dipilih strategi kebijakannya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan karena strategi kebijakan

[44] Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan, Analisis*…… 112
[45] Ibid, 113
[46] M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…….. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan seni untuk mengelolah sumberdaya yang ada agar sasaran yang dituju tercapai secara efektif dan efisien. Pemilihan strategi yang dimaksud adalah : strategi yang menekan hasil, strategi yang menekan proses, strategi komprehensif.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka dalam mengimplementasikan pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek perilaku manusia dan segala sikapnya, karena aspek perilaku manusia sangat penting, sebab kalau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat maka implementasi kebijakan terjadi penolakan. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap perubahan dan implementasi kebijakan yaitu: Pertama, adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hadirnya perubahan, kedua kekurangan informasi yang diterimanya berkenaan dengan kebijakan tersebut.

Dari dua penyebab penolakan tersebut di atas jelas bahwa, setiap ada implementasi kebijakan maka harus ada sosialisasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat terhadap pembuat kebijakan, namun fenomena yang terjadi sekarang ini selalu kurang komunikasi sehingga rakyat selalu berdemo setiap ada implementasi kebijakan yang baru, walau akhirnya masyarakat tetap menerima meskipun tidak sepenuh hati / keterpaksaan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah saran yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas yang diberikan formulasi kebijaksanaan yang bersifat teoritis. Pokok perhatiannya adalah pada pemilihan arah berupa tindakan dan pengamatan bahwa hal tersebut ditelusuri dan diikuti sampai selesai dengan tuntas waktu pelaksanaan. Oleh karena itu implementasi kebijakan sebagai proses teknis yang bersifat dinamis dan interpretative, tidak dapat dilepaskan adanya kemungkinan peluang dan tantangan yang mengiringi perjalanan proses implementasi tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh keberhasilan para pelaku atau implementor dalam mengisi berbagai peluang dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Bertolak dari beberapa penjelasan tersebut di atas pada dasarnya dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses harus dilalui setelah kebijakan itu dibuat.

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan dengan tidak dibarengi implementasi adalah sebagai hal yang mustahil, bahkan lewat implementasi itulah maka kebijakan dioperasionalkan, sampai pada gilirannya tercapai tujuan diharapkan. Demikian juga dalam mengimplementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di UINSA dalam pengembangan program studi perlu memerhatikan beberapa faktor-faktor sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM

> "Jika engkau mau membangun bangsamu maka bangunlah terlebih dahulu lembaga pendidikanmu. Sebab, pendidikan adalah pintu strategis yang harus dilalui dalam membagun peradaban bangsa. Tidak pernah ada masyarakat yang maju dimuka bumi ini tanpa adanya lembaga pendidikan yang kukuh dan berkualitas. Dan jika engkau sedang mengurus pendidikan maka lakukan dengan seluruh kekuatan yang engkau miliki dan bahkan tidak perlu malu sekalipun lewat meminta-minta. Sebab, pada hakikatnya mengurus pendidikan adalah mengurus orang lain dan generasi bangsa"[47]

Tulisan diatas menjadi inspirasi kekuatan motif dalam pengembangan jurusan/ program studi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi agama islam negeri - dalam hal ini adalah UINSA- tidak lepas dari berbagai persoalan yang terkait dengan simbol "islam" yang merupakan ciri khas dan basis intelektual, moral, spritual dalam pengembangan kualitas jurusan/program studi itu sendiri, juga perangkat pendukung (sumber-sumber pengembangan) yang tersedia serta aturan-aturan birokratis yang harus dipenuhi disaat program studi itu akan dibuka dan dikembangkan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yang perlu dipikirkan adalah pertimbangan relevansi atau aspek pragmatis, yaitu sejauh mana hasil pembukaan jurusan/program studi ini memliki relevansi dengan kehidupan atau kebutuhan masyarakat.[48] Untuk UINSA skop area di daerah Surabaya sebagai area terkecil, output UINSA mampu mengimbangi kebutuhan-kebutuhan *human*

---

[47] Pikiran cerdas yang sebagaimana yang telah disebutkan diperoleh dari negara yang telah berhasil membangun lembaga pendidikan dan masyarakat dalam membangun peradaban modern, tulisan ini didapatkan ketika kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di Jerman, selengkapnya lihat Imam Suprayogo dan Rasmianto, *Perubahan Tinggi Islam, Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 143

[48] Ibid, 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resource yang dibutuhkan oleh instansi-instansi di Surabaya dan lebih melebar ke skop jawa timur, nasional serta internasional.

Wider mandate menerapkan konsep pendidikan yang holistik yakni pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pembinaan fisik, pancaindera, dan intelektual, melainkan juga pendidikan yang juga mempertajam intuisi, estetika, moral dan inteletektual. Proyek pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan kegamaan transformatif tidak hanya sekedar berubah, proyek besar reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama mengandung artinya dialog dan kerjasama antara dsisiplin ilmu umum dan agama yang lebih erat di masa yang akan datang.[49] Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

Dari ayat diatas (dilanjutkan dengan tiga ayat berikutnya) diperoleh keterangan yang sangat jelas tentang eksistensi Ulul Albab – penulis menambahkan juga dengan integrasi keilmuan--, antara lain: sumber informasi kebenaran/keilmuan adalah segala yang terdapat pada penciptaan langit dan bumi (ruang), dan pergantian malam dan siang (waktu). Dengan kata lain segala apa yang ada (materi) dan segala apa yang terjadi (fenomena). Dalam kondisi dan posisi bagaimanapun Ulul Albab selalu mengingat Allah.

[49] Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi ; Pendekatan Integratif-interkonektif* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006), 399

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain selalu menambatkan hati dan jiwanya (berkomitmen kuat) kepada Allah. Dan yang menjadi media komitmen kepada Allah itu tiada lain adalah Al Quran (Adz Dzikr) yang akan selalu menjadi pengarah dan pengendali seluruh aktivitas jiwanya sehingga mampu mengeksplorasikan pengamatan dan penalarannya membaca ayat-ayat Allah di berbagai situs berupa materi dan fenomena yang terbentang dihadapannya. Dalam PTAI untuk mencapai posisi yang demikian perlu adanya beberapa inovasi dalam pengembangan keilmuan yang kemudian dibungkus dalam pengembangan porgram studi/jurusan.

1. Pendekatan Integratif-Interkonektif Untuk Pengembangan Program Studi di Perguruan Tinggi Islam

Memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam dinamika pendidikan islam merupakan upaya pemberian pemahaman bahwa pada dasarnya seluruh ilmu itu berasal dari Yang Maha Esa, yang selanjutnya usaha pendalaman dan pengembangan terhadap keduanya merupakan manifestasi ibadah.[50] Jika selama ini terdapat sekat-sekat yang sangat tajam antara "ilmu" dan "agama" dimana keduanya seolah menjadi entitas yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipertemukan, mempunyai wilayah sendiri baik dari segi objek-formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan hingga institusi penyelenggaranya. Maka tawaran paradigma integratif-interkoneksi berupaya mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut tanpa meleburkan

[50] Statement ini merupakan ungkapan Azyumardi Azra yag dikutip oleh Triono Ali Mustofa, selengkapnya lihat buku yang editori oleh Akh. Muzakki, Gap Dip SEA, M. Ag, M. Phil., Ph.D, *Konversi ke UIN Sunan Ampel ; Tuntutan, Harapan, dan Tantangan,* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sama lain tetapi berusaha mendekatkan dan mengaitkannya sehingga menjadi “bertegus sapa” satu sama lain.

Gagasan keilmuan yang integratif dan interkonektif ini muncul dari tantangan perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Teknologi yang semakin canggih sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antara bangsa dan budaya, persoalan migrasi, revolusi IPTEK, genetika, pendidikan, hubungan antar agama, gender, HAM dan lain sebagainya. Perkembangan zaman mau tidak mau menuntut perubahan dalam segala bidang tanpa tekecuali pendidikan keislaman, karena tanda adanya respon yang cepat melihat perkembangan yang ada maka kaum muslimin akan semakin jauh tertinggal dan hanya akan menjadi penonton, konsumen bahkan korban di tengah ketatnya persaingan global. Menghadapi tantangan era globlalilasi ini, umat Islam tidak hanya sekedar butuh untuk survive tetapi bagaimana bisa menjadi garda depan perubahan. Hal ini kemudian dibutuhkan reorientasi pemikiran dalam pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan.

Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerjasama antar berbagai disiplin ilmu akan menjadikan *narrowmindedness.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara aksiologis, paradigma interkoneksitas menawarkan pandangan dunia manusia beragama dan ilmuwan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama serta transparan. Sedangkan secara antologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antar disiplin keilmuan ini masih tetap ada.[51]

Inti dari epistemologi ini adalah ide dan usaha dalam memunculkan dialog sekaligus kerjasama antar berbagai disiplin ilmu umum dan agama diamana bisa dicirikan dari model ini adalah dikedepankannya metode interdisipliner,interkonektifitas. pengembangan ide / proyek ini (reintegrasi epistemology keilmuan agama dan umum) perlu lebih dikuatkan,dialog dan kerjasama antar disiplin ilmu umum dan agama makin dieratkan. Pendekatan interdisciplinary dikedepankan,interkoneksitas dan sensitivitas antar berbagai disiplin ilmu perlu memperoleh skala prioritas dan dikembangkan terus menerus. Yang kemudian dimanifestasikan salah satunya dengan perubahan dan metamorfosa IAIN menjadi UIN. Contoh konkritnya adalah ketika fakultas syariah misalnya,juga dimasuki mata kuliah ilmu-ilmu social, filsafat ilmu,dan budaya dengan harapan alumninya bisa survive ketika mereka berhadapan dengan realitas social kemasyarakatan dan keagamaan yang

[51] Dalam hemat penulis, Apa yang ditawarkan oleh Amin Abdullah dengan paradigma integratif-interkonektif secara konseptual memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan islam (*Islamic Studies*), dimana dialog antar disiplin ilmu akan semakin memperkuat keilmuan islam dalam menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada. Namun demikian apa yang telah digagas oleh Amin Abdullah ini ketika diaplikasikan dalam bentuk pendidikan model UIN menurut subyektifitas penulis menjadi tidak *applicable* dalam pengembangan studi islam, karena dalam hal ini tenyata pekembangan IAIN menjadi UIN –sekali lagi menurut pandangan penulis- justru semakin menyisihkan keilmuan agama murni dari ilmu alam dan sosial humaniora dan membuat ketidakjelasan. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah mahasiswa yang berminat terhadap program studi agama murni,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu kompleks.Begitu juga fakultas Tarbiyah, Dakwah, Adab dan Ushuludin.

Pengembangan jurusan/program studi itu sendiri tidak lepas dari persoalan yang terkait dengan simbol "Islam" yang merupakan ciri khas dan basis intelektual, moral, dan spritual dalam pengembangan kualitas jurusan/program studi itu sendiri. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan relevansi atau aspek pragmatis, yaitu sejauh mana hasil pembukaan jurusan/program studi ini memiliki relevansi dengan kehidupan atau kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai apa yang diupayakan susah payah malah tidak memberi manfaat, meminjam istilahnya Pak Marwan Sarijo (mantan sekjend Departement Agama) "para lulusan perguruan tinggi kita akan menjadi korban idealisme kita".[52]

Dengan demikian perguruan tinggi islam sebagai *human investment* memiliki kawasan yang lebih luas, dan hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang komprehensif, bahwa dalam membangun manusia tidak saja sebatas pengembangan aspek intelektual, melainkan juga spritual, sosial dan profesional sekaligus.

2. Regulasi Penambahan Program Studi

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab I Pasal 1). Perguruan Tinggi bertujuan: Pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota

[52] Imam Suprayogo dan Rasmianto, *Perubahan Tinggi Islam, Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan Nasional (PP. No. 60 Tahun 1999, Bab II Pasal 1).

Untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi tersebut, salah satunya perlu ditunjang oleh keberadaan jurusan atau program studi. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan akademik program sarjana dan/atau program pascasarjana, dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (PP. No. 60 Tahun 1999, Bagian Ketiga Pasal 66).

Dalam memenuhi tuntutan peran dan fungsi jurusan/program studi pada perguruan tinggi, maka diperlukan berbagai penyempurnaan dan pengembangan sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian akademik yang berorientasi pada kemajuan dan profesionalitas jurusan/program tersebut (Standar Mutu UIN, 2008: 62). Mengacu kepada Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pada Pasal 1 ayat 6 dinyatakan kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selamalamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah (Bab III Pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000).[53]

a. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam

1) Persyaratan Umum
   a) Pengajuan program studi baru harus mengindahkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
   b) Lembaga pengusul tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan di bidang pendidikan, misalnya menyelenggarakan kelas jauh.
   c) Bagi PTAIS menyertakan Pakta Integritas tentang larangan kelas jauh yang telah ditandatangani lembaga pengusul dengan Direktur Pendidikan Tinggi Islam.
   d) PTAI dapat membuka program pendidikan diploma dengan program studi yang sesuai dengan satu atau sekelompok disiplin ilmu yang dikemb angkan.
   e) Program studi yang telah ada pada lembaga pengusul telah terakreditasi BAN PT.
      i. Untuk pengajuan program studi tingkat sarjana (S.1), nilai akreditasi program studi yang ada (existing) minimal rata-rata B.
      ii. Untuk pengajuan program studi tingkat Magister (S.2), nilai akreditasi program studi jenjang sarjana (S.1) yang serumpun dengan program studi yang diajukan bernilai A.
      iii. Untuk pengajuan program studi tingkat Doktoral (S.3), nilai akreditasi program studi jenjang magister (S.2) yang serumpun dengan program studi yang diajukan bernilai A.
   f) Lembaga pengusul dilarang menerima mahasiswa pada program studi yang diajukan sebelum memperoleh

[53] http://www.kopertais2.or.id/_uploads/post/2013/09/03/20130903210416-704.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang ijin pembukaan program studi.

g) Perguruan tinggi yang mengusulkan program studi tertentu pada tingkat Magister (S.2) harus memiliki program studi sejenis di tingkat Sarjana (S.1).

h) Perguruan tinggi yang mengusulkan program studi tertentu pada tingkat Doktor (S.3) harus memiliki program studi sejenis di tingkat Sarjana (S.1) dan Magister (S.2).

2) Persyaratan Khusus

a) Lembaga pengusul mengajukan surat permohonan pembukaan program studi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

b) Lembaga pengusul menyusun proposal pembukaan program studi (Sistematika proposal dijelaskan secara detail pada BAB II) .

c) Lembaga pengusul melampirkan dokumen pendukung berupa:

i. Foto copy Akte Notaris Pendirian BP-PTAI (Badan Penyelenggara PTAI) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

ii. Foto copy statuta/AD- ART lembaga.

iii. Foto copy sertifikat kepemilikan tanah.

iv. Foto copy SK/ Sertifikat akreditasi program studi yang sudah ada (existing).

v. Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang kelayakan

vi. pengajuan program studi baru (bagi PTAIS).

vii. Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan.[54]

b. Penamaan Perguruan Tinggi dan Nomen Klatur Jurusan

1) PTAI dengan Nama Sekolah Tinggi

Dibawah ini adalah *nomenklatur* yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam.[55]

[54] Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor dj.i/212/2011 Tentang Persyaratan dan prosedur pembukaan program studi Perguruan Tinggi Agama Islam

[55] Mengenai cabang bidang dan program studi bisa lihat di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	PTAI	Nama PTAI	Jurusan	Program Studi
01	Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)	Jurusan Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam
				Manajemen Pendidikan Islam
			Jurusan Pendidikan Madrasah	Pendidikan Bahasa Arab
				Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
				Penddikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
		Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS)	Jurusan Ilmu Syari'ah	Akhwal As-Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam)
				Perbandingan Madzhab
				Ilmu Falak
			Jurusan Pidana-Politik Islam	Jinayah (Hukum Pidana Islam)
				Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara Islam)
			Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)	Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
				Zakat dan Wakaf
		Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah/Islam (STIES/STEI)	Jurusan Ekonomi Islam	Ekonomi Syari'ah
			Jurusan Ekonomi Praktis	Perbankan Syari'ah
				Asuransi Syari'ah
		Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam	Jurusan Penyiaran Islam	Komunikasi Penyiaran Islam
				Manajemen Dakwah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		(STIDKI)	Jurusan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Masyarakat Islam
				Bimbingan Konseling Islam
		Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU)	Jurusan Qur'an Hadis	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
				Ilmu Hadis
			Jurusan Pemikiran Islam	Akhlak Tasawwuf
				Filsafat Agama
			Jurusan Studi Agama-Agama	Ilmu Aqidah
				Perbandingan Agama
		Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI)	Jurusan Sejarah dan Sastra	Bahasa dan Sastra Arab
				Sejarah dan Peradaban Islam
			Jurusan Sosiologi/Antropologi Islam	Sosiologi Agama
				Antropologi Agama

2) PTAI dengan nama Institut

Dalam UU No.12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk itu pengajuan pendirian PTAI baru dengan bentuk institut bisa ditempuh dengan ketentuan harus mengajukan minimal 6 program studi yang tersebar pada 3 bidang ilmu (fakultas) yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan kemudian. Institut Agama Islam (IAI) menyelenggarakan 6 fakultas yaitu :

a) Fakultas Tarbiyah
b) Fakultas Syari'ah
c) Fakultas Adab dan Budaya Islam
d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
f) Fakultas Ekonomi Islam Syari'ah

3) PTAI dengan nama Universitas

Penyelenggaraan Fakultas dengan Pola Integrasi Keilmuan, penamaan fakultas mengikuti *nomenklatur* yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu :

a) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
b) Fakultas Syari'ah dan Hukum
c) Fakultas Adab dan Humaniora
d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
f) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam[56]

[56] Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id